

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI
Jl.Ahmad Yani No. 13 Telp. (021) 885 2144
BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmad-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 dapat kami susun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025. Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA



Drs. ASEP GUNAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 198603 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	5
1.2	Landasan Hukum	10
1.3	Maksud dan Tujuan	15
1.4	Sistematika Penulisan	
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	25
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi perangkat Daerah	30
2.4	Rewiew terhadap rancangan Awal RKPD Perubahan	30
2.5	Penelahaan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	33
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaah terhadap kebijakan Nasional	
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	
3.3	Program dan Kegiatan	
BAB IV	PENUTUP	
	Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian ,baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan ,kaidah serta pelaksanaanya serta rencana tindak	40-60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efektif dan efisien.

Dinas Tenaga Kerja untuk menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tiga tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kota Bekasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi :

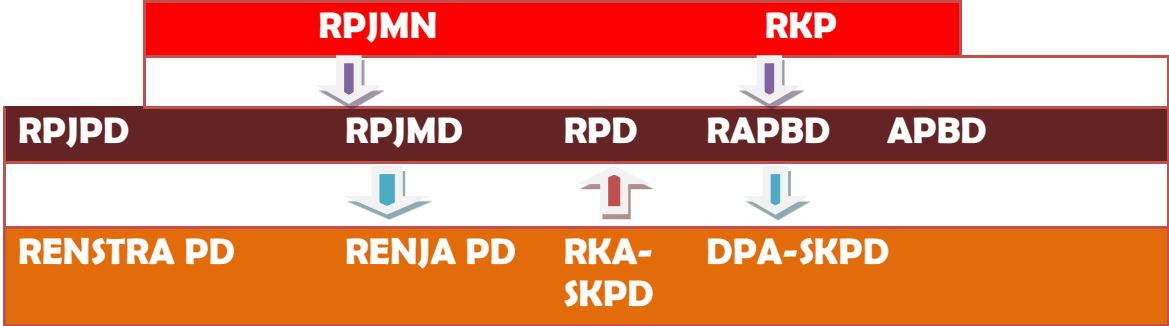
- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;

- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan. Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Keterangan:

- dipedomani dan/ataudiacu
- dipedomani dan/ataudiacu

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2024 sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan pada akhirnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (**RKA-SKPD**) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum.

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3458);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025 adalah:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;

2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024-2026 pada tahun 2024; dan
3. Memudahkan Evaluasi kinerja dan Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud dan Tujuan; dan 1.4. Sistematika Penulisan.
BAB	II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB	III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI 4.1 Program dan Kegiatan
BAB	V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahu 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian
Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

No	KODE	Rancangan Awal RKPD				LOKASI	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF 2024 (Rp)		TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
		DINAS TENAGA KERJA			26,180,000,000.00			26,180,000,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26,180,000,000.00			26,180,000,000.00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			26,180,000,000.00			26,180,000,000.00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	23,130,000,000.00		-	23,130,000,000.00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	100 %	55,000,000.00		-	55,000,000.00	
	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10 Laporan	55,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	55,000,000.00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	17,075,000,000.00		-	17,075,000,000.00	
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	47 Orang/bulan	17,000,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	47 Orang/bulan	17,000,000,000.00	

	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	75,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	4 Laporan	75,000,000.00	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	400,000,000.00		-	400,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	200,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	50,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	50,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1,150,000,000.00		-	1,150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	100,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	300,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		300,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	450,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		450,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Pak	100,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	150 Dokumen	200,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	150 Dokumen	200,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	650,000,000.00		-	650,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel							

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Unit	150,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	500,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		500,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3,050,000,000.00		-	3,050,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4000 Laporan	150,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	96 Laporan	400,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		400,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	34 Laporan	2,500,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		2,500,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	750,000,000.00		-	750,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	16 Unit	350,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		350,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	250,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		250,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	2 Unit	150,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	<i>Persentase cakupan ketersediaan dokumen</i>	1 Dokumen	300,000,000.00		-	300,000,000.00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	1 Dokumen	300,000,000.00		-	300,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro							
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	1 Dokumen	300,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		300,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja</i>	30 %	950,000,000.00		-	950,000,000.00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	480 Orang	500,000,000.00		-	500,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	480 Orang	500,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		500,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	150,000,000.00		-	150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi							
			<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	1 Perizinan	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	150,000,000.00		-	150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil							
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	60 Perusahaan	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	150,000,000.00		-	150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	3 Dokumen	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	900,000,000.00		-	900,000,000.00	

	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	300,000,000.00		-	300,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan							
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	30 Orang	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		200,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja							
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	10 Orang	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	350,000,000.00		-	350,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online							
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja							

			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	300 Orang	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		200,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	250,000,000.00		-	250,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	45 Orang	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran							
			<i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i>	10 Orang	150,000,000.00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya		150,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	900,000,000.00		-	900,000,000.00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	900,000,000.00		-	900,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA

	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	100 Perkara	450,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		450,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	108 Perkara	250,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		250,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		200,000,000.00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H				26,180,000,000.00			26,180,000,000.00	

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Capaian Kinerja

Nilai	Kategori	Warna	Notifikasi
$\geq 80\%$	Tercapai	Hijau	
60% - 79%	Kurang Tercapai	Kuning	
$\leq 59\%$	Tidak Tercapai	Merah	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	Notifikasi
1	2	3
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Peningkatan Disiplin Aparatur		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program Penempatan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
1. Adanya Kerjasama dengan dinas terkait, dengan Cevest ,BLK Propinsi dan BLK Swasta .	Memaksimalkan kegiatan pelatihan maupun fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai anggaran yang ada.	Memaksimalkan kegiatan pelatihan maupun fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai anggaran yang ada.
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tercapai 100 % dengan penyebab diantaranya : 1. salah satu pihak yang berselisih adanya kesepakatan sehingga berlanjut ketingkat mediasi 2. berselisih dari awal mempunyai keinginan kuat untuk menyelesaikan di Tingkat mediasi Hubungan Industrial		

Tabel 2.4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

No	indikator	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8		9	10		11		12	13
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	170	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	25 %	25 %	60%	80 %	100 %	
2	Besaran Tenaga Kerja yang berbasis kewirausahaan	149	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	30 %	25 %	70 %	80 %	100%	
3	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis masyarakat	149	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	15 %	25 %	35 %	70 %	80 %	100 %	
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama /PBin	447	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program jamsostek	4.380	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	30 %	20 %	80 %	90 %	100 %	
6	Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan	7.632	7.500 org	7.500 org	7.500 orang	7.500 orang	7.500 orang	7.500 orang	5000 orang	7.500 Orang	7.500 orang	7.500 orang	7.500 orang	
7	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian	23	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	25 %	35 %	30 %	70 %	100 %	
8	Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan	17.225	35 %	40 %	70 %	75 %	100 %	35 %	40 %	25 %	40 %	30	100%	
9	Persentase Pengusaha melakukan UMK yang telah ditetapkan	1.590	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Menurunnya angka sangketa pengusaha dengan pekerja	134	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan di daerah. Indikator umum untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. Pada tahun 2022 terdapat jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 7.500 orang, jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebesar 4.593 orang, sedangkan pencari kerja yang dilatih sebanyak 2.907 orang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut

Perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang

dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Masih cukup besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Rendahnya produktifitas tenaga kerja
3. Tidak semua pencari kerja dan perusahaan melaporkan penempatan tenaga kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sehingga akan mempengaruhi data tenaga kerja yang ditempatkan karena pada kenyataannya jika ada lowongan pekerjaan.
4. Masih adanya sangketa pengusaha dan pekerja, walau dapat diselesaikan tingkat mediasi

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja
- b. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis

2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2023 dilaksanakan secara kuisioner berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,

sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak dipungut biaya atau GRATIS.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1	2	3
1	Persyaratan	100 %
2	Prosedur	100 %
3	Waktu Pelayanan	100 %
4	Produk Spesifikasi Jenis	100 %
5	Biaya/Tarif	0 %
6	Produk Spesifikasi Jenis	100 %
7	Layanan	100 %
8	Kompetensi Pelaksana	100 %
9	Sarana Prasarana	100 %
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	100 %

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

2.5. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam hal peningkatan pelayanan baik dari kondisi internal dan eksternal, antara lain:

Kondisi Internal

a. Faktor Pendorong

- 1) Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industri alternatif sebagai Penyangga Ibu Kota Jakarta , banyak terdapat pengusaha baik formal karena banyak lahan-lahan buat usaha kecil. dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak dan masih tingginya angka pengangguran.
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;

b. Faktor Penghambat

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
- 3) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
- 4) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

Kondisi Eksternal

a. Faktor Pendorong

- 1) Kota Bekasi sebagai Penyangga Ibukota DKI sehingga untuk peluang wirasusaha baru memadai.
- 2) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan
- 3.) Teknologi informasi yang semakin maju

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih tingginya angka pengangguran
- 2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah

- 4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- 5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi)
- 6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global
- 7) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kota Bekasi meliputi:

1. Faktor Internal

a. Peluang

- 1) Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Kota Bekasi dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif;

b. Tantangan

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
- 3) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi.

2. Faktor Eksternal

- 1). Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Kota Bekasi dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif

2.6 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindak lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, Pelatihan Tenaga kerja dan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah :

1. Masih cukup besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Rendahnya produktifitas tenaga kerja
3. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi jabatan fungsional tertentu seperti Mediator Hubungan

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kota Bekasi yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja
2. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis

2.9. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2023 Kota Bekasi “Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan”

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan, dan efektifitas penurunan angka pengangguran;
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	17.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	17.000.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang dilatih		400.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang dilatih		400.000.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	200.000.000			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	200.000.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	150.000.000			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	150.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		450.000.000			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		450.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	500.000.000			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	500.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 laporan	2.500.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 laporan	2.500.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	350.000.000			umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	350.000.000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	250.000.000		3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	150.000.000		2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase cakupan ketersediaan dokumen									

2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi . Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah di bidang tenaga kerja mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah tahun 2024-2026 . yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul
3. Kemandirian ekonomi daerah

Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan konfirmasi kembali sebelum diproses menjadi Rencana Kerja (RENJA). Telaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan selanjutnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan tahun 2024

Program		Indikator		Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
1		2		3	4	5	6
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase cakupan ketersediaan dokumen	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro
2.	Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
						Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
		2.	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi
							dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.	Program Penempatan Tenaga kerja	1.	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
						Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
						Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		2.	Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin				

4.	Program Hubungan Industrial		Persentase sengketa pengusaha dengan pekerja yang diselesaikan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga kerja. Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dirumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan indeks kepuasan masyarakat	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja

2.	Meningkatnya tenaga kerja yang adaptif dan kesejahteraan masyarakat	Memperbanyak pelatihan kepada kerja lokal berbasis kalaborasi	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Menurunnya sangketa pengusaha dengan pekerja	Presentase penanganan sangketa pengusaha dengan pekerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan kegiatan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (desk)			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting terkait perubahan dari Rancangan Awal ke Rancangan	
											Rancangan Awal	Rancangan			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.) Ran Wal	Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan	Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Desk	Sumber Dana		
					Program	Keluaran Sub Kegiatan Rancangan Awal	Keluaran Sub Kegiatan Rancangan	Keluaran Sub Kegiatan Hasil Desk	Hasil Kegiatan						
Dinas Tenaga Kerja											23.950.000.000	24.104.020.000	19.136.502.280		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											23.950.000.000	24.104.020.000	19.136.502.280		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											23.950.000.000	24.104.020.000	19.136.502.280		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											21.625.000.000	21.625.000.000	16.826.463.280		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											250.000.000	250.000.000	204.207.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%		0	2 Dokumen	100%	-	-	179.207.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyelenggaraan Forum PD dalam rangka 1. Penyusunan Renja dan 2. Penyusunan Renstra, nara sumber dalam rangka menghasilkan output 2 Dokumen Perencanaan. rincian belanja Honor narsum penyusunan Renstra/Renja, FGD, perjalanan dinas, mamin rapat, sewa gedung, cetak, penggandaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	250.000.000	250.000.000	25.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belum input rincian belanja, output laporan kinerja.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12.248.742.920	12.248.742.920	11.293.669.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	100%	12.243.742.920	12.243.742.920	11.288.669.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fotocopi, jilid laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										450.000.000	450.000.000	401.250.000		

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase layanan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	68 Paket	3 paket	1 paket	100%	150.000.000	150.000.000	101.250.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembelian Bahan Baju PDH dan Baju TKK sesuai jumlah pegawai (81 orang)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase layanan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	10 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengiriman peserta (kontribusi) sebanyak 15 orang @10.000.000,- identifikasi kebutuhan bimtek yang diperlukan.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	1 Orang	78 Orang	81 Orang	100%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan 2 malam, lokasi di Jawa Barat, mengundang narsum.
Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.205.000.000	1.205.000.000	565.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi														
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	3 Paket	1 Paket	8 Paket	100%	15.000.000	15.000.000	10.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan instalasi peralatan listrik (bateri AA, A3, Baterai persegi. LES, TL, Terminal Listrik, Kabel Roll/Coaxial, Kabel NYM)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	3 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	400.000.000	400.000.000	400.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Paket (ATK, Kertas dan cover, materei, bhn komputer, perabot kantor, natura (mamin pegawai))
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	1 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	200.000.000	200.000.000	50.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cetak disposisi, cetak kertas dan cover (kop surat), cetak alat dan bahan lainnya (map, amplop dinas dll)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.000.000	20.000.000	15.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Langganan koran
Fasilitasi Kunjungan Tamu														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	100%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mamin tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	500.000.000	500.000.000	50.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rapat kordinasi ke luar daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	50.000.000	50.000.000	20.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan rak arsip dan box
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										400.000.000	900.000.000	900.000.000		
Pengadaan Mebel														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	10 Unit	125 Unit	131 Unit	100%	200.000.000	200.000.000	200.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kursi rapat chairman, kursi rapat staf, kursi tunggu, lemari besi, filing cabinet, jam dinding dll
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	10 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	200.000.000	700.000.000	700.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	AC, Video Wall, Komputer, Laptop, mesin finger, CCTV, sound system (hitung kembali sesuai kebutuhan)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.629.336.280	2.737.337.280	2.737.337.280		

Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	4000 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja paket pengiriman dan pos
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	96 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	400.000.000	400.000.000	400.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dihitung kembali sesuai dengan kebutuhan Tagihan telepon, tagihan listrik dan internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	34 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	2.214.336.280	2.322.337.280	2.322.337.280	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	TKK berkurang 2 orang, tambah jasa kebersihan 4 orang TTK, Jasa kebersihan dan jasa keamanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										4.441.920.800	3.833.919.800	725.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	16 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	350.000.000	350.000.000	350.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dihitung kebutuhannya sesuai dengan lampiran II perpres 33 tahun 2020 hal. 38, mobil 6 : kendaraan jabatan 6 unit mobil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	3 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	250.000.000	250.000.000	25.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mobil operasional 2 Motor 10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	2 Unit	251 Unit	251 Unit	100%	150.000.000	150.000.000	150.000.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan komputer, laptop, AC, printer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3.691.920.800	3.083.919.800	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pagu agar disesuaikan kembali dengan kebutuhan, mengingat sudah ada gedung baru (pembuatan unit layanan disabilitas)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										1.200.000.000	1.070.000.000	1.204.000.000		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										700.000.000	700.000.000	1.074.000.000		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30%	480 Orang	250 Orang	252 orang	100%	700.000.000	700.000.000	1.074.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BELUM DESK
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja										150.000.000	20.000.000	30.000.000		
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30%	1 Perizinan	3 perizinan	3 perizinan	100%	150.000.000	20.000.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bagi LPK yang belum memiliki izin, peserta : 20 LPK
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil										150.000.000	150.000.000	100.000.000		
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Persentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30%	50 perusahaan	50 Perusahaan	perusahaan	100%	150.000.000	150.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbaiki desain kegiatan
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										0,00	0,00			
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Persentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	200.000.000	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	perbaiki desain kegiatan, desain kegiatan harus bisa mengukur seberapa besar daya saing dan produktivitas tenaga kerja di kota bekasi.
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										750.000.000	509.020.000	334.020.000		

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										375.000.000	900.000.000	772.019.000		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										375.000.000	900.000.000	772.019.000		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	100 Perkara		1 perkara	100%	225.000.000	450.000.000	322.019.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapat 2 kegiatan, Depeko, May Day (hari buruh), Agar di desain ulang konsep kegiatannya yang berhubungan dengan pencegahan hubungan industrial, target sub kegiatan belum ada	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	108 Perkara		1.perkara	100%	75.000.000	250.000.000	250.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Agar di desain ulang konsep kegiatannya yang berhubungan dengan penyelesaian hubungan industrial, target sub kegiatan belum ada	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	100%	1 Lembaga		1 Lembaga	100%	75.000.000	200.000.000	200.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja diperuntukan untuk operasional LPK tripartit	

USULAN POKIR YANG MASUK KE DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	FRAKSI	PROGRA M	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	REKOMEN DASI SKPD	HASIL DESK
1	723726	29-02-2024	SODIKIN, SH	DEMOKRAT	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	pelaksanaan peratihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Pelatihan/Pe mbinaan Kelompok Sadar Wisata	Pelatihan Kecantikan untuk warga di Wilayah Pondok Melati	Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Lanjutkan	100.000.000
2	712953	28-02-2024	Komarudin, S.Pd.I	GOLKAR	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	pelaksanaan peratihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Pelatihan/Pe mbinaan Kelompok Sadar Wisata	Pelatihan service Motor, Kel.Mustikajaya dan Kel.Padurenan Katar Mustikajaya dan Katar Padurenan	Pelatihan service Motor, Kel.Mustikajaya dan Kel.Padurenan Katar Mustikajaya dan Katar Padurenan, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Mohon dilampirkan surat proposalnya	1 paket 100.000.000

BAB V

penutup

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RKPD) daerah dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target, program kegiatan.

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

2. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
3. Melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
4. Menjaga konsistensi antara RPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,



Drs. ASEP GUNAWAN, M.Si